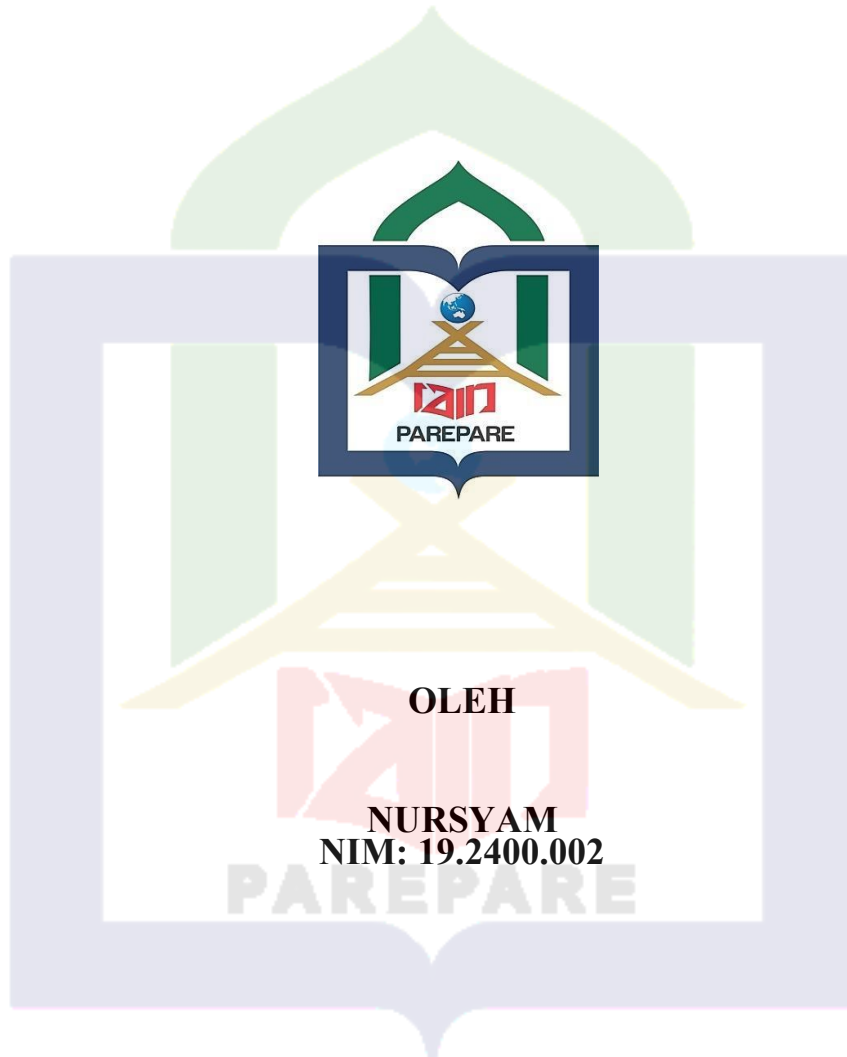


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI NILAI DISTRIBUSI ISLAM DALAM
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI DESA
PAKENG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURSYAM
NIM: 19.2400.002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI NILAI DISTRIBUSI ISLAM DALAM
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI DESA
PAKENG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURSYAM
NIM: 19.2400.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.E) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Nilai Distribusi Islam dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nursyam

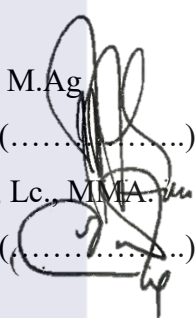
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.002

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 1598/ .39 .&/PP .00.9/04/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 

NIP : 19710208 200112 2 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MPA. 

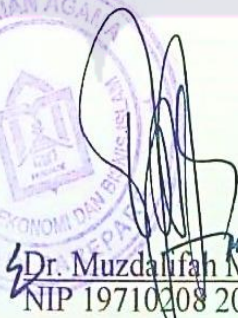
NIP : 19880701 201903 1 007 (.....)

Mengetahui:

Dekan,-

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Nilai Distribusi Islam dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nursyam

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.002

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 1598/ .39 .&/PP .00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (Ketua)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris)

Dr. Hj. St Nurhayati M.Hum (Anggota)

Rusnena M.Ag (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,-
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِينَ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ وَمَنْ تَبَعَ هَدَاهُمْ إِلَى
الْيَوْمِ.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul ” Implementasi Nilai Distribusi Islam dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ”Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, M.E.I selaku Ketua prodi Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya secara konstisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
4. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan system administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta bapak dan ibu pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
7. Ibu Roslina Sebagai Sekertaris Desa Pakeng yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Pakeng serta Bapak dan Ibu pegawai Kantor desa pakeng.

8. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.
9. Muhammad Dirham selaku saudara penulis yang telah menjadi motivasi serta menjadi penyemangat dan menemani penulis hingga bisa selesai di IAIN Parepare.
10. Syahrudin S.H yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Kepada para sahabat saya Pipi Ardianti, Nurhikmah, Muliananda, Juliahana, Nurjannah, Hadariah mucshin, Tri resky fikri dan Hasriani yang senantiasa menemani saya dalam setiap proses yang saya lewati selama berkuliah di IAIN pare-pare
12. Seluruh teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 19 semasa bangku perkuliahan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Maret 2023
15 Sya'ban 1444 H

Penulis,



Nursyam

NIM. 19.2400.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nursyam
NIM : 19.2400.002
Tempat/Tgl. Lahir : Lajoro, 13 April 2001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Nilai Distribusi Islam dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Maret 2023

15 Sya'ban 1444 H

Penulis,



Nursyam

NIM. 19.2400.002

ABSTRAK

Nursyam. *Implementasi Nilai Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Didesa Pakeng Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh ibu Muzdalifah Muhammdun dan.Bapak Muhammad Majdy Amiruddin).

Bantuan sosial dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilakukannya, berdasarkan hal itu masih banyak penduduk miskin di Desa Pakeng yang belum mendapatkan bantuan sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menguraikan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial di desa pakeng kabupaten pinrang. Kedua, Untuk mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial. Ketiga, untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan sosial didesa pakeng sudah menerapkan nilai distribusi dalam ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan teknik pengolahan data *coding, Tabulasi, Kategorisasi dan Uji Keabsahan Data*. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) mekanisme penyaluran bantuan sosial didesa pakeng dibagi menjadi 4 tahap yang pertama seleksi kandidat penerima bantuan sosial, kedua seleksi pemberkasan atau administrasi, ketiga tahap sosialisasi kemudian yang terakhir yaitu penyaluran atau pemberian bantuan kepada yang menerima bantuan. 2) factor pendukung efektivitas penyaluran bantuan sosial yaitu jumlah, waktu, dan kualitas bantuan tersebut, sedangkan factor penghambatnya yaitu kemudian hasil yang terakhir yaitu benar adanya bahwa dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng sudah menerapkan nilai-nilai distribusi dalam ekonomi islam dimana para aparat yang terlibat sudah berlaku adil dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat miskin.

Kata Kunci: Evaluasi, Mekanisme dan Bantuan sosial

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori Implementasi	10
2. Teori Mekanisme Distribusi	11
C. Kerangka Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Sosial	52
2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial.....	55
3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial.....	58
4. Nilai-nilai distribusi dalam ekonomi islam.....	62
B. PEMBAHASAN PENELITIAN.....	64
1. Implementasi Nilai Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial.....	64
2. Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial.....	66
3. Kesesuaian Proses Pendistribusian Bantuan Sosial Dengan Nilai-Nilai Distribusi Dalam Ekonomi Islam.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
BIODATA PENULIS.....	98

DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Halaman
Kerangka Fikir	41

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1	Tabel Penerima Bantuan PKH	53
2	Tabel Penerima Bantuan BLT	55
3	Tabel Penerima Bantuan Sembako	57

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kampus	80
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari PTSP	81
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	82
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	83
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	85
Lampiran 6	Dokumentasi	92
Lampiran 7	Biodata Penulis	98

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَيَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إَيَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
ؤُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

علي :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمِرتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ إلى آخرها/إلى آخره=

ج جزء=

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata”edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. :: “dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. :: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab baiasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan digambarkan layaknya sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya penghasilan yang mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk mengakses berbagai layanan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Adanya kemiskinan ini telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, akses ke jaminan kesehatan dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan manusia di Indonesia.

Hal ini terjadi karena masalah kemiskinan yang sudah lama dan gejalanya kini semakin kian meningkat seiring dengan krisis multidimensi yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Adapun data kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibanding tahun sebelumnya yakni 25,14 juta¹. Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk beradaptasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Pengertian lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan

¹Badan Pusat Statistik Indonesia (Bps), (30 November 2020).

sumber daya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas². Penyebab kemiskinan di Indonesia juga bermacam-macam mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkatkan, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan distribusi pendapatan yang berbeda antara satu daerah dan lainnya yang menjadi pemicu kemiskinan kian tuntas. Salah satu senjata yang digunakan pemerintah untuk memerangi dan memberantas kemiskinan ini adalah pemberian program bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. ³Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program Bantuan sosial ini khususnya di Sulawesi Selatan sudah ada sejak 1 Juni 2010. Program tersebut telah banyak membantu masyarakat Sulawesi Selatan dan memberikan kontribusi yang pada dasarnya dibutuhkan masyarakat. Program pemerintah ini pun digalakkan di Kota Pinrang tepatnya di Desa Pakeng dimulai sejak tahun 2017. bantuan sosial dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilakukannya, berangkat dari itu masih banyak penduduk miskin di desa pakeng

²Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasi Orang Miskin*, (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia Ipb Dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 2.

³Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), h, 2-3.

yang belum mendapatkan bantuan sosial Seperti yang kita ketahui, penanggulangan dan pengawalan bagi masyarakat yang kurang mampu bukanlah hal yang mudah untuk diatasi secara cepat, mengingat kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yaitu situasi yang dimana dialami oleh suatu bangsa dan terdapat berbagai macam konflik baik itu konflik kecil hingga konflik yang besar, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral.

Masalah yang muncul dikarenakan adanya pendistribusian yang tidak merata pada masyarakat yang membuat penyalurannya pun tidak tepat pada sasaran sebagaimana mestinya yang telah didata oleh pihak kelurahan dan tentunya perlu ditindak lanjuti. Berdasarkan dari hasil observasi wawancara beberapa masyarakat di Desa Pakeng di lapangan menunjukkan sebagian masyarakat desa pakeng beranggapan bahwa sistem pendataan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa ada ke ganjalan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa aparat desa hanya mementingkan atau mendahulukan keluarga terdekatnya untuk mendapatkan bantuan sosial. Disamping itu ada penggolongan untuk kategori bantuan sosial ada bantuan sosial untuk masyarakat yang memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan dan ada juga bantuan sosial untuk lansia. hal ini kemudian menimbulkan perdebatan antara masyarakat sebagian besar masyarakat beranggapan mereka tidak masuk ke dalam kedua golongan bantuan sosial tersebut tetapi mereka juga termasuk orang yang tidak mampu secara finansial.

Berangkat dari observasi awal, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul implementasi nilai distribusi islam dalam mekanisme pemberian bantuan sosial di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, pokok masalah dalam penelitian ini adalah implementasi nilai distribusi islam dalam mekanisme pemberian bantuan sosial di desa pakeng kabupaten pinrang. dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendistribusian bantuan sosial pada masyarakat di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan proses pemberian bantuan sosial?
3. apakah penyaluran bantuan sosial di desa Pakeng sudah sesuai dengan nilai-nilai distribusi dalam ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan sosial pada masyarakat di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan proses pemberian bantuan sosial
3. Untuk memantau apakah pendistribusian bantuan sosial di desa pakeng sudah sesuai dengan nilai-nilai distribusi dalam ekonomi islam

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Searah dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi dan bisnis islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan Evaluasi sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan serta pengetahuan untuk menambah wawasan kepada masyarakat bahwa beginilah mekanisme penyaluran bantuan sosial agar kedepannya tidak ada lagi kata saling mencurigai antara masyarakat dan pemerintah .

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial didesa Pakeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini mencakup tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat juga perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi.

Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, yang membahas tentang “*Mekanisme Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*” pada tahun 2018.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan perspektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan variabel penelitian efektivitas, program, Rastra, BPNT, dan beras dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT, permasalahan utama dalam program Rastra harus segera diselesaikan, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, rapel beras, jumlah beras yang diterima, dan kualitas beras yang masih rendah. Sementara pada program BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan signal GPRS di semua wilayah, sasaran penerima dan kualitas beras juga perlu segera diatasi.

Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama

⁴Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, 2018).

mengangkat tema penyaluran bantuan sosial namun yang menjadi pembeda disini terletak pada jenis bantuan sosialnya. Jika penelitian diatas hanya membahas tentang BTN di dalam penelitian ini membahas semuanya atau keseluruhan bantuan sosial baik itu tunai maupun non tunai.

Kartiawati, yang membahas tentang “*Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*” pada tahun 2018.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam dengan variabel penelitian kemiskinan dari perspektif ekonomi islam, efektivitas, dan PKH dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan PKH di Kampung Bonglai yang dimulai sejak tahun 2014-2018 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah di Kampung Bonglai kurang terlaksana secara efektif.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu sebelumnya dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema penyaluran bantuan sosial namun yang menjadi pembeda disini terletak pada jenis bantuan sosialnya. Jika penelitian diatas hanya membahas tentang PKH di dalam penelitian ini membahas semuanya atau keseluruhan bantuan sosial baik itu tunai maupun non tunai.

⁵Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Eni Erika, yang membahas tentang “*Analisis Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19*” pada tahun 2021.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid 19 dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial sempat menimbulkan kericuhan dikarenakan pembagiannya yang tidak merata.

Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial walaupun peneliti sebelumnya hanya mengkhususkan pada saat pandemik saja.

Latri yuhelmi yang membahas tentang “*Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Kepada Masyarakat Kelurahan Air Putih Pekan Baru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*” pada tahun 2022. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh aparat desa sudah terlaksana secara efektif dan sudah tepat sasaran.⁷

Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana efektivitas penyaluran bantuan sosial walaupun peneliti sebelumnya hanya mengkhususkan pada saat pandemik saja.

⁶Eni erika, Analisis Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19” (Makassar : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri Makassar 2021)

⁷Latri yuhelmi, efektivitas penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) covid-19 kepada masyarakat kelurahan air putih pekan baru ditinjau menurut ekonomi syariah (Jakarta : Percetakan 2022)

M.Rasi Aswadi yang membahas tentang “Efektivitas Bantuan Tunai Langsung Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Yang Ditinjau Dalam Analisis Ekonomi Islam” Pada tahun 2021. Dengan hasil yang menunjukkan penyaluran bantuan dana desa tidak tepat sasaran atau terdapat keganjalan didalam proses penyaluran dana bantuan sosialnya.⁸

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁶ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan

b. Unsur-Unsur Implementasi

Terdapat beberapa pendapat mengenai unsur-unsur implementasi. Pesaribu dan Simandiuntak dalam buku Proses Belajar Mengajar (1980) menjelaskan bahwa ada tiga unsur implementasi yaitu:

⁸M.Rasi Aswadi, *Efektivitas Bantuan Tunai Langsung Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Yang Ditinjau Dalam Analisis Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Depublish Publisher 2021).

1. Unsur efektivitas
 2. Unsur ketepatsasaran
 3. Unsur kecukupan
 4. Unsur Responsivitas
- c. Tujuan Implementasi
1. Mengetahui kesiagaan sasaran.
 2. Mengetahui seberapa jauh proses pelaksanaan.
 3. Mengetahui apakah bahan pelajaran yang diberikan dapat dilanjutkan atau diulangi.
 4. Untuk mengetahui kemajuan anak didik.
 5. Membandingkan apakah prestasi yang telah dicapai sesuai dengan kapasitas atau belum.
 6. Dapat informasi kecocokan bahan dan metode.
 7. Menafsirkan kesiapan anak didik sebagai bagian output program di masyarakat.
 8. Mengetahui efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan.

2. Teori Mekanisme Distribusi

A. Pengertian Mekanisme

1. menurut Jogianto mengemukakan bahwa sistem atau mekanisme adalah kumpulan dari elemen–elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah objek nyata, tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.

2. Menurut L. Ackof, mekanisme adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian–bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain.⁹
3. Defenisi Sistem menurut Lani Sidharta “mekanisme adalah himpunan dari bagian–bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan yang sama”¹⁰

Jadi sistem atau mekanisme adalah sekumpulan cara atau prosedur yang menyatukan tiap elemen agar tujuan mudah tercapai.

B. Klasifikasi mekanisme

1. Sistem abstrak atau fisik, mekanisme abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide–ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik seperti sistem computer, sistem produksi, sistem penjualan dan lain sebagainya.
2. Sistem alamiah dan mekanisme buatan manusia, sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak di buat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang dan malam dan pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan *human machine system*.

⁹Sri Marmoah ,*Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Deepublish Publisher), 2018. h. 245.

¹⁰Jepersonhutahean, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta : Depublish publisher), 2014. h. 1-2.

3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik, sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat di prediksi disebut dengan sistem deterministic, sedangkan sistem probabilistic adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat di prediksi karena mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem terbuka dan tertutup, sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan di pengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya.¹¹

C. Pengertian Distribusi

1. Distribusi menurut Assauri distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat.¹²
2. Distribusi menurut Hollensen adalah cara bahwa ia harus lebih dekat dengan pelanggan . Biasanya pemikiran pemasaran melihat distribusi sebagai saluran yang mengambil produk dari produsen ke konsumen.¹³

¹¹Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset), 2012. h. 15.

¹²WandyZulkarnaen. dkk, Pengembangan *supply chain managemen* dalam pengelolaan distribusi (Jimea: Jurnal ilmiah manajemen, Ekonomi, Akuntansi , Volume 4 , Nomor 2,2020), h. 227.

¹³Zulki Zulkifli Noor, *Manajemen Pemasaran Stratejik dilengkapi dengan kasus-dalam bidang bisnis dan sector public* (Yogyakarta : deepublish, 2012) h. 64.

3. Distribusi menurut C. Gleen Walters dalam Angipora distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.
4. Distribusi menurut Koegan adalah sistem yang menghubungkan manufaktur ke pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut di tangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barangindustri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari.
5. Distribusi menurut Fandi Tjiptono diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.¹⁴
6. Distribusi menurut Basu Swastha fisik adalah kegiatan kegiatan dari aliran aliran material seperti pengangkutan, penyimpanan, serta pergudangan persediaan. Lebih lanjut menjelaskan 3 elemen pokok diantaranya pertama Lembaga yang terlibat dalam pemindahan barang seperti pedagang pengecer dan agen, kedua fungsi fungsi yang diperlukan untuk melaksanakan pemindahan secara fisik yaitu *traffic*, pengasaan

¹⁴Subagyo. Dkk, *Akuntansi manajemen berbasis desain* (Yogyakarta: Gajahmada university press, 2018), h. 139.

penyediaan, *scheduling*, dan penganggaran material serta yang terakhir jaringan komunikasi khusus.¹⁵

Jadi distribusi adalah kegiatan yang berupa penyaluran barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

D. Sistem Distribusi

Distribusi berakar dari Bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribut*, berdasarkan kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hassan Shadilly dalam dan Damsar, bermakna membagikan, menyalurkan menyebarkan, mendistribusikan, dan menangani. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, disamping produksi dan konsumsi.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro islam sebab pembahasan dalam bidang ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial¹⁶. Distribusi adalah suatu proses (Sebagian hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor produk untuk menentukan pendapatan. Distribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁷ Jadi distribusi merupakan pergerakan atau perpindahan barang atau jasa dari sumber sampai ke konsumen akhir, konsumen atau pengguna,

¹⁵Siboro. Analisis Strategi Saluran Distribusi Minyak Pelumas Enduro Pada Pt. Arjuna Lumas Dwiguna Pekanbaru, 2014 media.neliti.com. h. 7-8.

¹⁶Muklis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Jakad Media Publishing, 2020), h. 97.

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

melalui saluran distribusi (*distribution channel*) dan Gerakan pembayaran dalam arah yang berlawanan, sampai ke produsen asli atau pemasok.¹⁸

E. Tujuan Distribusi

1. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen
3. Tercapainya pemerataan produksi
4. Kelangsungan hidup kegiatan produksiterjamin
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa

F. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam

Kegiatan distribusi telah diatur dalam Islam Aturan distribusi dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan tuntuan yang benar. Tuntunan tersebut salah satunya tertuang dalam *fiqh al-mu'âmalah*. *Fiqh al-mu'âmalah* menetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal muamalah yang berbentuk kegiatan distribusi adalah boleh. Kegiatan distribusi dikatakan tidak boleh sampai terdapat nash Al-Qur'an yang mengharamkannya. Jadi, kegiatan distribusi dalam perspektif Islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ada larangan dari nash Al-Qur'an.

Selain itu, *fiqh al-mu'âmalah* juga menetapkan bahwa segala bentuk transaksi dalam kegiatan distribusi dapat dan boleh dilakukan dengan cara

¹⁸Subagyo. Dkk, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*, h. 139.

apapun berdasarkan kebiasaan yang baik dan benar (*'urf shahih*) yang berlaku dalam kehidupan umat manusia.

Kegiatan distribusi dalam perspektif Baqir Al-Sadr terbagi menjadi dua hal, distribusi pra produksi (mentahnya), dan distribusi pasca produksi. Distribusi yang pertama, praproduksi, adalah distribusi sumber daya alam yang terdiri dari empat kategori, yaitu; tanah, mineral (tambang), aliran air (sungai), dan kekayaan alam lainnya. Sumber daya alam ini kerap disebut sebagai faktor produksi alami. Faktor produksi alami dapat dikategorikan dalam empat kategori yang penjelasannya mencakup a) tanah dan mineral yang berada pada perut bumi seperti batubara, minyak, dan emas, b) aliran air (sungai), dan sisanya, c) kekayaan alam lainnya yang terdiri atas kandungan laut (mutiara dan hewan-hewan laut), kekayaan yang ada di permukaan bumi (hewan dan tumbuh-tumbuhan), kekayaan yang tersebar di udara (burung dan oksigen), kekayaan alam yang tersembunyi (air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun), dan kekayaan alam lainnya, serta d) faktor derivatif dalam bentuk modal dan kerja yang seluruhnya merupakan kekayaan yang diperlukan dalam proses produksi. Sedangkan distribusi yang kedua adalah distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi menekankan pada distribusi pendapatan atau kompensasi dan kekayaan dalam Islam.

Distribusi pasca produksi adalah distribusi yang menekankan pada teori pendapatan dalam perspektif Islam, yaitu teori kompensasi dan bagi hasil. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan kompensasi atau pendapatan

atas barang yang digunakan. Seseorang juga berhak mendapatkan bagi hasil atas keikutsertaannya dalam proses produksi.¹⁹

Makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperoleh kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya, dan kaidah-kaidah untuk mendapat dan mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dan distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi atau maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping penegembalian dalam *system* jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama *system* dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam.²⁰ Dalam perekonomian modern saat ini, menurut Ali Sakti dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Karena itu, menjadi penting melihat posisi sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan perspektif ekonomi Islam.

¹⁹Novie Andriani Zakariya. Sirajul Arifin, Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. (QUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 1, 2020), h.159-160.

²⁰Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Alquran*, (Yogyakarta: CV. Budi utama, 2018), h. 113.

G. Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Semua pribadi dalam masyarakat harus memperoleh jaminan atas kehidupan yang layak. Atas dasar dapat kita lihat beberapa tujuan ekonomi islam yaitu sebagai berikut :

1. Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Islam menjamin *kemaslahatan* pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara.
3. Mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara.
4. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah agar tercapai *maslahah* bagi seluruh masyarakat.

H. Nilai nilai distribusi dalam ekonomi islam

Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai ke Islaman,²¹ Adapun nilai nilai distribusi dalam ekonomi Islam yang dimaksud, yaitu :

1. Moral

Moral beranjak dari kata *moralis*. Disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada moralitas berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal memberi sanksi jika

²¹Muklis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Jakad Media Publishing, 2020), h. 98.

melanggar. Akan tetapi hukum moral tidak tetapi menembus kedalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja. Misalnya dalam kasus seorang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persis dengan nilai moral. Tapi jika niatnya jelek hanya untuk *riya*,

Maka sedekah demikian dian ggap salah dan divonis sebagai Tindakan yang tidak *berakhlakul kharimah*. kemudian salah satu nilai mural yang tertinggi adalah amat dalam menjalankan tugas apalagi dalam hal pendistribusian bantuan sosial tentu saja harus amanah dan dapat di percaya. Sesuai dengan firman Allah dalam (QS.an-Nisa':58) yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS.an-Nisa':58)²²

Amanah merupakan perilaku manusia yang paling berpengaruh terhadap hubungan manusia itu dengan sesamanya manusia karna amanah atau dapat dipercaya ini merupakan modal kita untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada sesame manusia, apabila seseorang tidak amanah maka hal ini akan memunculkan pro dan kontra sesamanya manusia.

2. Keadilan

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama

²²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemaah*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 57.

dari risalah para rasulnya dengan berbagai muatan adil tersebut secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensansi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan.²³

Distribusi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menyalurkan dari proses produksi ke kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi distribusi yang dimaksud yaitu distribusi barang dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini distribusi yang akan dibahas yaitu distribusi bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Dalam agama Islam telah mengajarkan bahwa harus ada keadilan dalam pembagian atau distribusi kekayaan itu dalam ajaran agama Islam terdapat berbagai aturan dalam pendistribusian kekayaan. Hal yang diatur antara lain harta apa saja yang wajib untuk didistribusikan kepada siapa saja harta didistribusikan dan aturan-aturan lainnya. Dalam konsep Islam sangat mengutamakan nilai-nilai keadilan didalamnya. Hal ini untuk mencegah adanya ketimpangan ekonomi. Ketika distribusi kekayaan tidak dilakukan secara adil dapat menjadikan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin ketika distribusi kekayaan dilakukan sebagaimana dalam ajaran agama Islam maka kesejahteraan ekonomi akan merata diantara masyarakat atau dapat mengurangi kemiskinan serta ketimpangan ekonomi.

Konsep keadilan dalam distribusi Islam anas zarga mengemukakan bahwa definisi distribusi adalah transfer dari pendapatan kekayaan antara

²³Muklis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), h. 100.

individu dengan cara pertukaran atau dengan cara yang lain seperti warisan, shadaqa, wakaf dan zakat. Dari defenisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya dan secara tidak langsung ketika berbicara tentang konsep ekonomi yang ditawarkan bagaimana islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan Negara melalui distribusi tersebut. Yang tentunya pendapatan Negara tidak terlepas dari ajaran-ajaran syariah Islam seperti zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan secara adil dapat ditingkatkan. Sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Dalam pembagian kekayaan kepada masyarakat tentunya harus berpatokan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. atau dengan kata lain adil yang dimaksud adalah memberikan barang maupun uang sesuai porsi dan hak masing-masing individu

Dalam Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan didalamnya dimana tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Distribusi kekayaan Negara pun diutamakan untuk kepentingan golongan yang membutuhkan seperti anak yatim, orang miskin janda, disabilitas dan golongan lainnya serta kepentingan bersama bukan hanya untuk umat muslim saja tetapi juga untuk non muslim. Konsep keadilan dalam distribusi diartikan sebagai Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Quran.

3. Kemaslahatan

Dalam kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. masalah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkait atau terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqashid al-syariah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih” (QS. Al-An'ām: 48).²⁴

Distribusi adalah bagaimana sumber daya dan komoditas di atas distribusikan dimasyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan masalah. Ilmu ekonomi memiliki kesempatan untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 49.

secara adil agar setiap individu kesejahteraannya hakiki. Disisi lain perilaku masyarakat muslim tidaklah selalu menjadi bahasan dalam ilmu ekonomi islam selama perilaku mereka tidak berorientasikan kepada maslahah. Ekonomi islam menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi maslahah studi terhadap perilaku ekonomi masyarakat muslim lebih merupakan suatu ujian atau verifikasi terhadap kepraktisan ekonomi islam yang mungkin juga dilakukan terhadap masyarakat non muslim.

I. Sistem distribusi dalam Islam

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar . Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak

hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan social. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas nonproduktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.²¹

Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasanya, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial, seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya.²⁵

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak

²⁵ Ukaysa. *Sistem Distribusi Islam*, (Yogyakarta: CV Penertbitan Buku, 2009) h. 3.

miliknya karena hal itu menjadi motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya. Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Kepemilikan Umum (*Collegitive Property*)

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas dan juga termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

2. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

3. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep tauhid. Allah sebagai Maha Pencipta adalah pemilik segala sesuatu.

Dia telah menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut, sungai dan lain-lain.²⁶

Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah. Diatur dengan peraturan yang diturunkan-Nya. Bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatu bersifat tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai Khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya. Dengan kedudukan ini manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi beserta isinya bagi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

J. Instrumen-instrumen Distribusi Ekonomi Islam

1. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fiqh zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁷ Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah secara individu dan secara sosial. Dengan mengeluarkan zakat maka akan mensucikan harta dan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.

²⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), 174

²⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam "Hukum Zakat", (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 34.

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanyaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yangberjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

2. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepadasesama.Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakatyaitu menyangkut delapan golongan dia atas, namun sedekah lebihdiprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yanglebih dekat kepada Allah.²⁸

3. Wakaf

Menurut Imam Nawawi, Zakat adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.²⁹

4. Nafkah

Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya bahwa tugas imam atau negara tidak

²⁸Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 134.

²⁹Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: PT Grasindo, 2007), 2.

sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Namun lebih dari itu, negara juga bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.³⁰

5. Wasiat

Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal.³¹

K. Distribusi dalam ekonomi Islam

Kegiatan distribusi telah diatur dalam Islam. Aturan distribusi dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan tuntunan yang benar. Tuntunan tersebut salah satunya tertuang dalam fiqh al-mu'âmalah. Fiqh al-mu'âmalah menetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal muamalah yang berbentuk kegiatan distribusi adalah boleh. Kegiatan distribusi dikatakan tidak boleh sampai terdapat nash Alquran yang mengharamkannya. Jadi, kegiatan distribusi dalam perspektif Islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ada larangan dari nash Alquran.

Selain itu, fiqh al-mu'âmalah juga menetapkan bahwa segala bentuk transaksi dalam kegiatan distribusi dapat dan boleh dilakukan dengan cara apapun berdasarkan

³⁰Yusuf Qardawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha Al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 143-144.

³¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), 174.

kebiasaan yang baik dan benar ('urf shahîh) yang berlaku dalam kehidupan umat manusia.

Kegiatan distribusi dalam perspektif Baqir Al-Sadr terbagi menjadi dua hal, distribusi pra produksi (mentahnya), dan distribusi pasca produksi. Distribusi yang pertama, praproduksi, adalah distribusi sumber daya alam yang terdiri dari empat kategori, yaitu; tanah, mineral (tambang), aliran air (sungai), dan kekayaan alam lainnya. Sumber daya alam ini kerap disebut sebagai faktor produksi alami. Faktor produksi alami dapat dikategorikan dalam empat kategori yang penjelasannya mencakup a) tanah dan mineral yang berada pada perut bumi seperti batubara, minyak, dan emas, b) aliran air (sungai), dan sisanya, c) kekayaan alam lainnya yang terdiri atas kandungan laut (mutiara dan hewan-hewan laut), kekayaan yang ada di permukaan bumi (hewan dan tumbuh-tumbuhan), kekayaan yang tersebar di udara (burung dan oksigen), kekayaan alam yang tersembunyi (air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun), dan kekayaan alam lainnya, serta d) faktor derivatif dalam bentuk modal dan kerja yang seluruhnya merupakan kekayaan yang diperlukan dalam proses produksi. Sedangkan distribusi yang kedua adalah distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi menekankan pada distribusi pendapatan atau kompensasi dan kekayaan dalam Islam.

Distribusi pasca produksi adalah distribusi yang menekankan pada teori pendapatan dalam perspektif Islam, yaitu teori kompensasi dan bagi hasil. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan kompensasi atau pendapatan atas barang yang

digunakan. Seseorang juga berhak mendapatkan bagi hasil atas keikutsertaannya dalam proses produksi.³²

Makna distribusi dalam ekonomi islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber sumber kekayaan. Dimana islam memperoleh kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya, dan kaidah kaidah untuk mendapat dan mempergunakannya dan kaidah kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi islam juga memiliki politik dan sitribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi atau maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping penegembalian dalam *system* jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam

Ekonomi islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa distribusi dalam ekonomi islam memiliki andil bersama *system* dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam³³

Dalam perekonomian modern saat ini, menurut Ali Sakti dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Karena itu, menjadi penting melihat posisi sector ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan prespektif ekonomi islam

³²Novie Andriani Zakariya. Sirajul Arifin, Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8 , Nomor 1, 2020, h.159-160.

³³Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Alquran*, (Yogyakarta: CV. Budi utama, 2018), h. 113.

L. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Secara umum bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan Menurut *Food and Agricultural Organization (FAO)* pada tahun 2003 mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.³⁴

Oleh sebab itu secara sederhana kita dapat defeniskan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Lalu kapan bantuan sosial mulai diterapkan di Indonesia? Bantuan sosial di Indonesia sesungguhnya telah muncul sejak masa pemerintahan orde baru, dan secara lebih bantuan sosial dikukuhkan pasca krisis ekonomi 1997-

³⁴Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media 2012), h. 2-3.

1998. Hal ini terlihat dengan lahirnya regulasi yang mendukung pelaksanaan program bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, seperti Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam undang-undang tersebut terlihat bahwa skema bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (in-cash transfers), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (in-kind transfers). Hingga saat ini, program bantuan sosial terus mengalami transformasi dan perkembangan bentuk sehingga dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Apabila kita ingin melihat kerangka bantuan sosial, maka kita akan berfokus pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, maupun komunitas. Risiko dan kerentanan ini terdiri dari dua bentuk yaitu dari dalam dan dari luar. Risiko dan kerentanan yang datang dari dalam dapat diartikan atau diartikan sebagai kerentanan siklus hidup tetap seperti yang dialami oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Bagi mereka yang mengalami hal tersebut akan ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat reguler. Contoh bantuan sosial tersebut adalah Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), dimana pada saat ini bantuan sosial tersebut masuk kedalam komponen kesejahteraan sosial kategori disabilitas berat dan lanjut usia diatas 70 tahun pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Risiko dan kerentanan bentuk kedua adalah risiko dan kerentanan yang datang dari luar, hal tersebut dapat disebabkan oleh bencana. Klasifikasi

bencana yang ditangani secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok, konflik antarkomunitas, dan teror. Risiko semacam ini ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah.

Bantuan sosial yang bersifat temporer ini secara umum ditangani oleh dua lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. Jenis bantuan yang biasanya ditangani oleh BNPB adalah penyediaan aksesibilitas, serta bantuan penguatan kelembagaan. Sedangkan jenis bantuan yang ditangani oleh Kementerian Sosial berupa bantuan langsung seperti pada saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 dan 2009 bertajuk bantuan langsung, dan tahun 2013, bantuan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan terakhir pada saat sekarang ini bantuan langsung tunai dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Bantuan-bantuan tersebut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial.

2. Jenis-Jenis Bantuan Sosial

Terus apa saja bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan ?. Berdasarkan keterangan pers Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor, kita ketahui bahwa rincian program bantuan sebagai berikut;

a. Program Keluarga Harapan (PKH).

Dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/ KSM). Tujuan khusus dari PKH adalah antara lain:

- a) PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
 - b) PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
 - c) Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.³⁵
- b. Program Sembako.

Program bantuan sembako adalah bantuan yang disalurkan dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk bahan pokok makanan seperti minyak, beras, telur, mie instan gula pasir dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari program ini adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, kemudian memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM,

³⁵Siswati Saragi, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Jurnal Ekonomi Manajemen, h. 58-59.

meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasinya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah memberikan pilihan kepada kpm dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

c. Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. program kerja kartu pekerja memiliki tujuan untuk :

1. Mengembangkan potensi angkatan kerja
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing antar angkatan kerja
3. Mengembangkan kewirausaha

Sekarang kita sudah mengetahui bahwa bantuan sosial itu apa dan bagaimana skema serta untuk siapa bantuan sosial itu diberikan, oleh sebab itu sebagai warga negara yang baik hendaknya kita harus jujur bahwa apakah kita masih layak menerima bantuan atau tidak. Jangan sampai bantuan sosial tidak tepat sasaran. Apabila hal tersebut terjadi maka tujuan dari bantuan sosial yaitu untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat

³⁶Dea Yulianti, Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kelengkapan Persediaan Sembako, Jurnal Ekonomi Syariah, h. 23-26.

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat tidak dapat terwujud.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian proposal ini berjudul Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Pakeng Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Ada beberapa hal yang digunakan dalam judul penelitian proposal ini untuk mengkaji focus penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran dalam memahami penelitian peneliti yakni:

1. Mekanisme Distribusi

Sistem atau mekanisme yaitu kumpulan dari elemen–elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah objek nyata, tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Adapun yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat atau dengan kata lain proses penyaluran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Jadi mekanisme distribusi adalah sekumpulan prosedur atau tata cara dalam proses penyaluran barang dari tangan produsen menuju tangan konsumen

2. Bantuan Sosial

a. Pengertian bantuan sosial

Secara umum bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan

Menurut Food and Agricultural Organization (FAO) pada tahun 2003 mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.³⁷ Terus apa saja bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan ?. Berdasarkan keterangan pers Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor, kita ketahui bahwa rincian program bantuan sebagai berikut;

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Sembako
- 3) Kartu prakerja
- 4) Bantuan berupa uang tunai

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial merupakan sekumpulan tahap atau alur dalam proses bantuan sosial sampai ketangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Dalam proses tersebut terdiri atas beberapa tahap diantaranya :

- 1) Pemantauan aparat desa
- 2) Pengumpulan kartu keluarga dan berkas lainnya

³⁷Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media 2012), h. 2-3.

- 3) Pengiriman berkas ke pusat
- 4) Pengumuman dan sosialisasi

b. Mekanisme penyaluran bantuan sosial

1. Tahap seleksi
2. Administrasi
3. Sosialisasi
4. Pemberian Bantuan

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme pemberian bantuan sosial

Guna memastikan dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, Kementerian Sosial (Kemensos) menjadikan ketepatan penyaluran dengan kriteria 6T sebagai indikator utama yaitu:

1. Tepat Sasaran

Dalam proses penyaluran bantuan sosial ada beberapa indikator keberhasilan dalam mekanisme penyalurannya salah satunya adalah tepat sasaran artinya bantuan yang di salurkan harus di salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan karna hal tersebut sudah menjadi hak bagi mereka. Dalam proses penyaluran bantuan sosial hendaknya dilakukan sesuai SOP yang berlaku, harus dilakukan dengan cara yang teliti dan cermat pada saat melakukan pendataan harus didata secara menyeluruh dan di masukkan sesuai kategori masyarakat miskin jangan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi menengah ke atas justru di jadikan kandidat penerima bantuan sosial jadi pendataan yang dilakukan harus jujur. Dalam proses pendataan juga tidak

boleh melibatkan sistem kekeluargaan artinya hanya keluarga terdekat saja yang dimasukkan sebagai kandidat penerima bantuan sosial hal tersebut termasuk kedalam kategori pelanggaran dan menyalahi SOP penyaluran bantuan sosial jadi hendaknya di data sesuai kenyataan dilapangan.

2. Jumlah

Jumlah adalah besaran yang harus diterima oleh penerima bantuan sosial tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya disini bantuan yang diterima harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dinas sosial masyarakat yang telah ditetapkan menerima bantuan berupa beras harus menerima beras, begitupun masyarakat yang menerima uang tunai harus menerima uang tunai tidak boleh dibolak balik. Masyarakat yang memiliki anak yang masih bersekolah mendapat bantuan PKH, masyarakat yang sudah masuk lansia mendapat bantuan uang tunai sebesar 300.000.00, dan masyarakat yang termasuk keluarga miskin dan tidak mempunyai anak bersekolah mendapat bantuan berupa sembako. Dalam penyaluran bantuan harus dilakukan seadil-adilnya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ibu tarima selaku ibu RT disalah satu kampung yaitu kampung lajoro.

3. Waktu

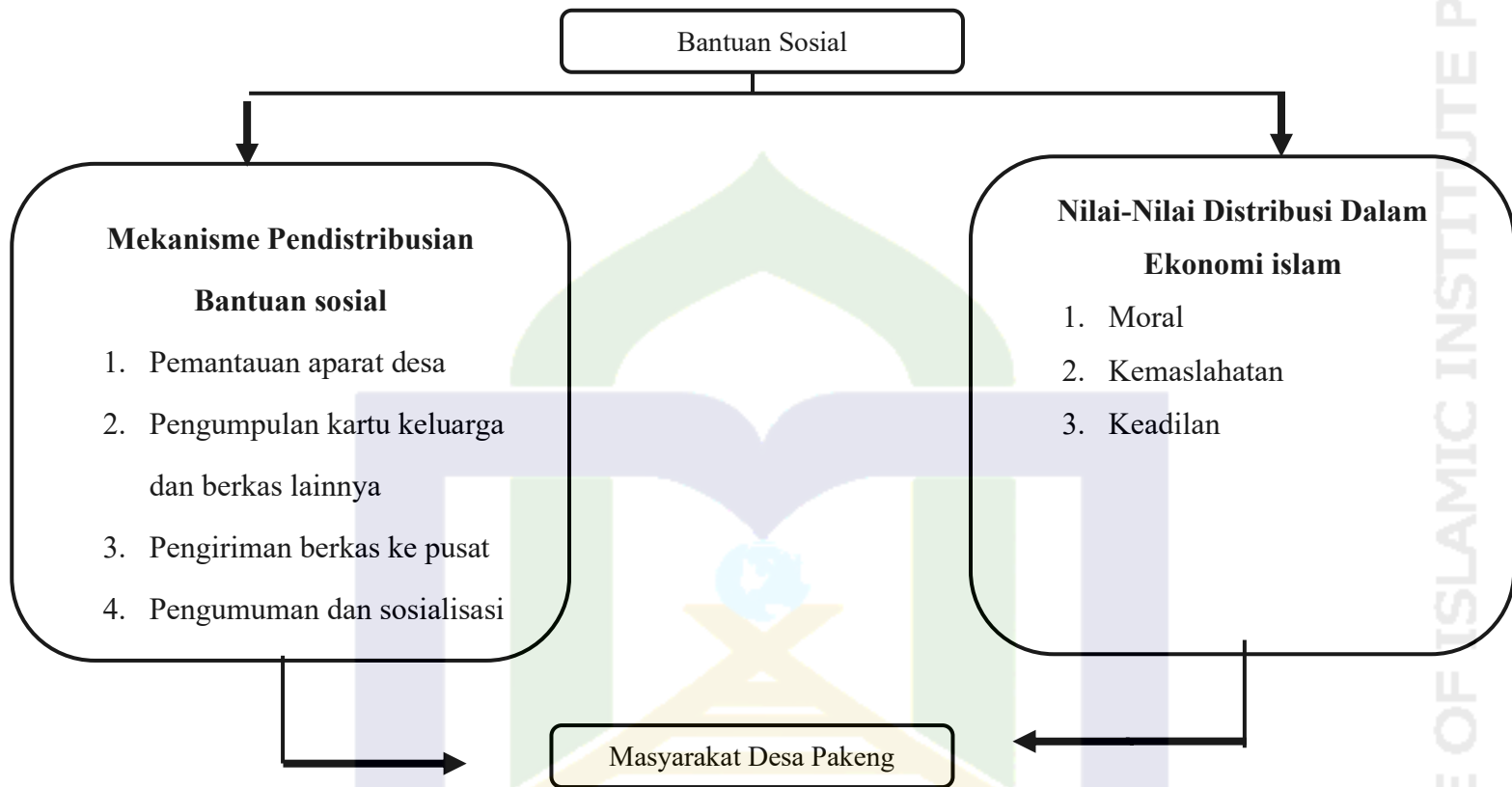
Waktu adalah kapan diberikannya bantuan sosial, hal ini juga sangat perlu diperhatikan oleh aparat desa terkait waktu pemberian bantuan sosial karena hal tersebut juga telah diatur dalam SOP penyaluran bantuan sosial jadi tidak semerta-merta dalam pembagian atau pemberian bantuan sosial. Hal ini diperuntukkan kepada para aparat desa agar sekiranya apabila bantuan sosial

sudah ada maka seharusnya dibagikan agar dapat digunakan oleh masyarakat yang menerima atau membutuhkan bantuan.

4. Kualitas

Kualitas adalah selalu berhubungan tentang kondisi barang apakah barang yang diberikan kemasyarakat termasuk barang yang berkualitas baik atau buruk. Karna sebenarnya hal ini termasuk hal yang sensitive bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial. Pemerintah desa tidak boleh beranggapan bahwa beras ini akan dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu jadi persoalan kualitas tidak perlu memberikan barang yang memiliki kualitas yang tinggi. Justru dalam keadaan seperti ini kita selaku masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah tentang apakah pemerintah ini memang bekerja untuk masyarakat atau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau kah hanya sekedar menjalankan tugasnya dan tidak ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu asni terkait kualitas barang atau sembako yang diteri

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas penulis memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, yang dimana penyaluran bantuan sosial harus sesuai dengan defenisi yang tepat dan berdasarkan fungsi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya ditambah berdasarkan ekonomi Islam distribusi harus berdasarkan nilai nilai yang telah di tetapkan agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan semestinya tanpa melibatkan unsur ketidak adilan

didalamnya. Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang antar variabel yang satu dengan yang lain.³⁸



³⁸Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN ParePare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat di amati.³⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁴⁰ Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung dan tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, dan observasi. Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan di jadikan pembanding dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

⁴⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah didesa pakeng kecamatan lembang kabupaten pinrang.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan bentuk Angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara ,analisis ,dokumen maupun observasi yang dilakukan.

2. Sumber data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan.

⁴¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (DalamTeoriPraktek)* (Jakarta RineaCipta, 2006). h. 64.

Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴² Dalam penelitian ini data primer langsung diperoleh dari orang yang tidak menerima bantuan sosial, orang yang menerima bantuan sosial dan aparat yang bekerja di kantor desa sebagai pendata dan penyalur bantuan sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴³ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui dokumentasi serta literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Dalam hal ini pengamatan dikhususkan terhadap proses kegiatan evaluasi sistem distribusi Islam dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di desa Pakeng Kabupaten Pinrang.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dengan tujuan mendapatkan keterangan dengan cara bertemu

⁴²Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁴³Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

langsung dan melakukan tanya jawab kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial, yang menerima bantuan sosial dan para aparat desa sebagai penyaluran bantuan sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁴⁴

2. Teknik pengolahan data

Dalam riset kualitatif tahap pengumpulan dan pengolahan data merupakan proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep dan penyusunan kembali dengan cara yang baru.

a. Coding

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pengelolaan data yang merupakan dasar dari proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Metode riset ini menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan *coding* sebagai alat utama dari pengolahan data. Proses biasanya dimulai dengan pengkodean (*coding*) serta pengkategorian

⁴⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 30.

data. Ada beberapa cara untuk melakukan pengkodean, yaitu: pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean terporos (*axial coding*) dan pengkodean terpilih (*selective coding*). Selama proses *coding* ini diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung.

b. kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

c. Tabulasi

Pengertian Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan.

Dalam pengertian sederhana tabulasi dapat diartikan sebagai proses menyusun data, atau fakta-fakta yang telah diedit di beri kode kedalam bentuk tabel. Langkah ini dijalankan guna mempersiapkan data yang telah di olah agar dapat di pelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang di peroleh

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁵ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, member check.⁴⁶

b. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.⁴⁷

c. Pengujian *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁴⁸

b. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

Pengelolaan data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian

⁴⁵Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Cetakan 14. h. 368.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Cetakan 14. h. 376.

⁴⁸Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴⁹

1. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antara data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*, 2006, h. 63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Sosial

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui proses pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan berdasarkan tema dan kode untuk mengungkapkan bahwa mekanisme penentuan penerimaan bantuan sosial telah menjadi salah satu proses utama dalam proses penyaluran bantuan sosial dimana pada proses penentuan ini adalah tahap yang paling berperan penting dalam mekanisme penyaluran bansos dikarenakan ditahap inilah kita akan melakukan proses penyeleksian siapa yang akan mendapatkan bantuan sosial. seperti halnya yang di jelaskan oleh pak edi selaku pendamping desa tentang bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan sosial dan mekanisme pemberian bantuan sosial di Desa Pakeng.

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip wawancara	Koding	Kategori
1	menurut bapak bagaimana proses penentuan penerima bantuan sosial apakah sudah dapat dikatakan mekanisme penentuan penerima bantuan sosial di Desa Pakeng ini sudah efektif atau belum efektif.	Pak Edi selaku pendamping desa	“ mekanisme penentuan penerima bantuan sosial terbagi atas 4 tahap dimana tahap yang pertama adalah pihak aparat desa akan melakukan rapat yang akan dihadiri oleh beberapa orang penting yang ada didesa itu misalnya ketua RT RW tokoh agama dan lain sebagainya para masyarakat yang hadir ini akan diminta untuk mengajukan beberapa nama yang menurut mereka layak untuk mendapatkan	Mekanisme penentuan penerima	Rapat yang dilakukan aparat desa dan tokoh masyarakat.

			bantuan sosial, setelah itu Pihak aparat desa akan turun langsung kelapangan untuk memastikan apakah yang ada di rapat sudah sesuai dengan dilapangan jika hasil survei menunjukkan sesuai maka selanjutnya calon penerima bantuan sosial ini akan diminta untuk memasukkan beberapa dokumen pendukung seperti foto rumah foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP		
2	Bagaimana pendapat ibu sebagai masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial melihat penerima bantuan sosial apakah mereka yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial benar-benar sudah dapat dikatakan layak mendapatkan bantuan sosial.	Ibu Dahi selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial	“ menurut saya sendiri selaku aparat desa saya sudah bisa mengatakan bahwa mekanisme penentuan atau penyaluran bantuan sosial sudah bisa dikatakan tepat sasaran atas beberapa pertimbangan diantaranya tempat tinggal jumlah kendaraan pekerjaan dan penghasilan berdasarkan apa yang saya lihat benar adanya mereka yang menerima bantuan adalah mereka yang kurang mampu jika ditinjau dari aspek diatas”	Mekanisme penentuan penerima	Penentuan kandidat penerima
3.	Bagaimana pendapat ibu terkait beberapa aparat yang melakukan	Ibu Kuta selaku masyarakat yang tidak menerima	“ saya pernah melihat beberapa aparat desa yang pergi ke rumah tetangga saya beliau mengunjungi tetangga saya yang sudah	Mekanisme penentuan penerima	Survei kelapangan

	kunjungan ke beberapa rumah warga yang ada disekitaran sini.	bantuan sosial.	memasuki usia lansia dengan kondisi rumah yang sudah masuk kedalam kategori tidak layak huni aparat des aini menjanjikan akan memberikan bantuan berupa uang tunai langsung kepada nenek ini.”		
4.	Berkas apa sajakah yang diperlukan sebagai persyaratan dan pendukung untuk masyarakat melakukan pengajuan diri untuk mendapatkan bantuan sosial.	Ibu Roslina selaku aparat Desa Pakeng	“ adapun berkas yang diperlukan adalah foto rumah foto copy KTP, foto copy kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu yang dapat diurus dikantor desa”	Mekanisme penentu penerima	Pemberkasan
5.	Bagaimana cara mengenalkan kepada penerima bantuan sosial terkait bantuan yang mereka terima.	Ibu roslina selaku aparat desa pakeng	“ kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan apa sebenarnya bantuan sosial itu agar masyarakat paham bahwa bantuan sosial ini mereka dapatkan karna mereka termasuk golongan ekonomi menengah kebawah atau masuk dalam garis kemiskinan”	Mekanisme penentu penerima	Sosialisasi

Berdasarkan tabel wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan penentuan penerima bantuan sosial diantaranya melalui proses rapat yang diadakan oleh aparat desa, kemudian penentuan kandidat selanjutnya melakukan observasi lapangan, administrasi atau pelengkapan berkas dan sosialisasi yang di adakan

oleh aparat desa dengan mendatangkan narasumber yang memiliki keahlian atau yang tau banyak tentang bantuan sosial.

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui proses pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan berdasarkan tema dan kode untuk mengungkap bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial ini merupakan salah satu proses penyaluran bantuan yang diberikan kemasyarakat yang dalam kategori miskin atau tidak mampu.

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategorisasi
1.	Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan program keluarga harapan yang di terapkan di Desa Pakeng ini	Pak Edi	“ mekanisme penyaluran bantuan PKH itu dimulai dengan survei langsung kelapangan yang selanjutnya pengumpulan berkas-berkas pendukung setelah itu data akan dikirim ke pusat untuk dikonfirmasi apakah masyarakat ini bisa masuk dalam kategori penerima bantuan sosial, setelah itu barulah pembuatan ATM setelah pembuatan atm maka setiap posko atau kelompok penerima bantuan PKH akan menunjuk salah satu perwakilan yang akan	Mekanisme Penyaluran Bantuan	penyaluran bantuan PKH

			mengurus tentang pencairan dana dimana setiap penerima bantuan sosial akan membayarsi perwakilan tersebut dengan bayaran 25 ribu perorang		
2	Bagaimana dengan bantuan tunai langsung mekanisme yang di gunakan didesa ini seperti apa ?	Pak Edi	“ mekanisme penyaluran bantuan sembako dimulai dengan melakukan survei langsung kelapangan untuk memastikan apakah yang ada dirapat sudah sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan jika dirasa sudah sesuai maka selanjutnya akan ada proses pengumpulan berkas yang akan di kirim kepusat jika berkas sudah di acc oleh pihak pusat maka dana akan di transfer masuk ke dana desa yang selanjutnya aparat desa akan membagikan uang tersebut kepada masyarakat yang berhak atau yang mendapatkan bantuan sosial.	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Mekanisme penyaluran BLT
	Bagaimana mekanisme pemberian	Pak Edi selaku pendampi	“ untuk mekanisme penyaluran bantuan sembako ini ada dua	Mekanisme Penyaluran Bantuan	mekanisme penyaluran sembako

	bantuan sosial sembako?	ng desa	cara yaitu yang pertama persyaratan seperti biasa yaitu dokumen kemudian untuk proses penyalurannya menggunakan dua opsi car acara yang pertama pihak pusat akan mengirimkan bantuan dalam bentuk fisik atau sembako jadi aparat desa sisa membagikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang kedua pihak pusat akan memberikan bantuan dalam bentuk dana atau uang tunai yang selanjutnya aparat desa yang akan membelanjakan uang tersebut menjadi sembako yang kemudian akan dibagikan kemasyarakat.		
--	-------------------------	---------	---	--	--

Pada tabel wawancara diatas dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon penerima bantuan baik itu PKH BLT maupun Sembako namun yang perlu kita ketahui bahwa tahapan penyaluran setiap bantuan itu berbeda-beda misalnya pada bantuan PKH mekanisme penyalurannya itu melalui tahap pembukaan rekening giro, kemudian melalui perantara KPM sebagai perwakilan dan melakukan kerja sama dengan birektorat dalam proses penyaluran bansos tersebut. Sedangkan pada bantuan BLT berbeda karna tidak perlu melalui

perantara kpm maupun melakukan pembukaan rekening, hanya di perlukan pendataan dan pembuktian dilapangan senganakan untuk metode pemberiannya bantuan akan diberikan secara langsung oleh appart desa. Sedangkan pada bantuan sembako ada yang menarik dikarnakan pada bantuan sembako mekanisme penyaluran bantuan sembako bisa melalui 2 cara yaitu bisa melalui penyaluran bahan sembako langsung dari pusat bisa juga melalui perantara KPM yaitu dimana pemerintah pusat akan mentrasfer dananya ke pihak KPM dan proses selanjutnya KPM yang akan mengelola dana tersebut.

3. Faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui proses pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan berdasarkan tema dan kode untuk mengungkap bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi evektivitas penyaluran bantuan sosial didesa pakeng. Seperti halnya yang di sampaikan oleh ibu roslina selaku bendahara desa dan beberapa narasumber lain bahwa dalam penyaluran bantuan sosial ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penyaluran bansos yaitu sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategorisasi
1.	factor apa saja yang menjadi pendukung keefektivitas penyaluran bantuan sosial.	Pak edi	“ ada beberapa dek factor pendukungnya untuk ini bantuan sosial dapat berjalan dengan baik yang pertama itu persoalan ketepatan sasaran dimana factor ini sangat berpengaruh karna pada factor ini akan dilihat yang	Faktor pendukung	Tepat sasaran

			mana aparat yang benar-benar menjalankan tugasnya yaitu aparat yang benar-benar membagikan bantuan kepada yang benar membutuhkan bukan kepada masyarakat yang memiliki hubungan keluarga dengan si pegawai desa”		
2.	Faktor apa saja yang menjadi pendukung keefektivitas penyaluran bantuan sosial.	Pak Edi	“ yang kedua mengenai jumlah hal ini berkaitan dengan kejujuran pihak aparat desa apakah benar-benar menyalurkan bantuan dalam jumlah benar atau jumlah yang sudah seharusnya diberikan kemasyarakat tanpa mengurangi atau melebihi lebihkan porsi untuk setiap orangnya karna hal ini juga yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyaluran bantuan sosial jika disalurkan dalam jumlah yang tepat”	Faktor pendukung	Jumlah
3.	Faktor apa saja yang menjadi pendukung keefektivitas penyaluran bantuan sosial.	Pak Edi	“ salah satu indicator lain yang tak kalah penting ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dimana hal ini juga yang menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai apakah pihak aparat desa telah benar melaksanakan tugasnya tepat waktu tanpa adanya lagi drama penundaan pembagian	Faktor pendukung	Waktu

			bantuan sosial yang disebabkan oleh beberapa hal”		
4.	Faktor apa saja yang menjadi penghambatan penyaluran bantuan sosial ?	Pak Edi	“ salah satu factor yang menjadi penghambat yaitu keterlambatan dana masuk dari pihak pusat yang menyebabkan proses penyaluran atau pemberian bantuan sosial harus ditunda atau tidak tepat waktu sehingga hal ini yang kadang menimbulkan kemarahan dari masyarakat karna penjadwalan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan yang terjadi atau mengalami hambatan.”	Faktor penghambat	Keterlambatan dana
5.	Menurut ibu apakah sarana dan prasarana masuk kedalam salah satu factor penghambat penyaluran bantuan sosial	Ibu Roslina	“ masalah berikutnya berkaitan dengan sarana dan prasarana dimana hal ini berkaitan dengan akses jalan yang kurang memadai atau dengan kata lain lokasi tempat tinggal masyarakat calon penerima bantuan berada jauh di dalam pelosok desa hal ini yang menimbulkan kewalahan bagi pihak aparat desa karna jalan kadang tidak dapat diakses menggunakan motor jadi harus ditempuh dengan jalan kaki”	Faktor Penghambat	Sarana dan prasarana
6.	Ibu apakah ada kaitannya pihak aparat desa dengan	Ibu Roslina	“ tentu saja adad ek karna yang namanya kantor pasti ada saja jadwal atau kegiatan	Faktor penghambat	Ketidak siapan pihak aparat desa

	hambatan penyaluran bantuan sosial?		mendadak yang harus dihadiri oleh aparat desa yang menggharuskan proses pemberian bantuan sosial harus ditunda untuk beberapa saat waktu sehingga hal ini menimbulkan ketidak efektifan penyaluran karna sudah tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan”		
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel wawancara diatas didapatkan hasil bahwa salah satu hal yang ingin dicapai oleh aparat desa dalam proses penyaluran bantuan sosial adalah tentang ke efektivitasan dalam proses penyaluran bansos. Ada banyak faktor yang sangat dapat berpengaruh dalam efektivitas penyaluran bansos, diantaranya yaitu persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap penyaluran bansos mengapa demikian dikarenakan hal ini akan mengundang opini miring ketika proses penyaluran bansos terbilang tidak tepat sasaran. Kemudian selanjutnya adalah persoalan jumlah bantuan yang di terima oleh penerima bantuan karna apabila jumlah yang diterima oleh penerima bantuan sosial tidak sesuai maka hal ini juga bisa dikatakan tidak efektif karna ada kecuranagna didalamnya, kemudian yang terakhir persoalan waktu penyaluran bantuan hal ini juga perlu di pantau agar proses penyaluran bantuan tidak mengalami keterlambatan penyaluran bantuan. Sedangkan faktor penghambatnya ada 3 yaitu ketepatan dana dari pusat, sarana dan prasarana dan yang terakhir adalah kesiapan pihak aparat desa.

4. Nilai-Nilai Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui proses pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan berdasarkan tema dan kode untuk mengungkapkan bahwa di desa pakeng kab pinrang terdapat nilai-nilai yang dijadikan landasan para aparat desa agar dalam proses penyaluran bantuan sosial dapat disalurkan secara adil dan merata tanpa ada diskriminasi pihak masyarakat yang tidak mampu. Seperti halnya yang di jelaskan oleh ibu roslina dan beberapa narasumber lainnya terkait bagaimana penerapan nilai distribusi islam dalam mekanisme pemberian bantuan sosial.

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategorisasi
1	Bagaimana penerapan nilai keadilan dalam proses penyaluran bantuan sosial didesa pakeng.	Ibu Roslina	kami dek selaku aparat sanagat-sangat berusaha berperilaku adil dalam ini proses pendistribusian bansos kami sudah sangat selektif memilih siapa yang berhak mendapat bantuan dan siapa yang tidak tapi itu lagi dek kami tidak bisa merata kan bantuan jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu namun tidak mendapat bantuan karna itu bantuan yang kami salurkan sedikit jadi tidak bisa merata”	Nilai-nilai distribusi islam	Keadilan

2	Bagaimana penerapan nilai masalah dalam mekanisme pemberian bantuan sosial didesa pakeng.	Ibu Roslina	tentu saja kami dek selaku aparat desa akan selalu mengedepankan kemaslahatan para masyarakat desa pakeng karna itu kami selaku aparat desa pasti menginginkan masyarakat kami hidup dengan sejahterah makanya itu masyarakat kami yang sedang mengalami kesulitan akan kami bantu agar sekiranya hidupnya bisa sejahterah.	Nilai-nilai distribusi islam	Kemaslahatan
---	---	-------------	---	------------------------------	--------------

Berdasarkan tabel wawancara diatas didapatkan hasil bahwa dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial didesa pakeng para aparat desa sangat memperhatikan tentang penerapan nilai distribusi dalam ekonomi islam agar sekiranya dalam proses penyaluran bantuan sosial didesa pakeng terbilang adil dan tepat sasaran dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial didesa pakeng menerapkan beberapa nilai distribusi diantaranya nilai keadilan Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya dengan berbagai muatan adil tersebut secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan.⁵⁰

⁵⁰Muklis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), h. 100.

Distribusi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menyalurkan dari proses produksi ke kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi distribusi yang dimaksud yaitu distribusi barang dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini distribusi yang akan dibahas yaitu distribusi bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Kemudian nilai moral moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada moralitas berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal memberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi hukum moral tidak tetapi menembus kedalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja. Misalnya dalam kasus seorang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persis dengan nilai moral. Tapi jika niatnya jelek hanya untuk *riya'*.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Implementasi Nilai Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁶ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik.

Kebijakan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan⁵¹

Implementasi nilai distribusi islam dalam penyaluran bantuan sosial sangatlah diperlukan agar sekiranya dalam proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan sesuai dengan SOP yang telah berlaku.

Berdasarkan tabel 1 hasil wawancara dan survei langsung dilapangan telah berhasil di temukan bahwa implementasi penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng telah terimplementasikan dengan baik karna di Desa Pakeng memiliki mekanisme penyaluran bantuan sosial yang sangat baik dan telah tersruktur dimana di desa ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para aparat desa untuk mendapatkan penerima bantuan sosial diantaranya yaitu melalui rapat yang diadakan dengan para petinggi desa dimana pada tahap ini akan membahas siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

Selanjutnya para aparat akan melakukan survei langsung dilapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai apakah calon penerima bantuan ini benar-benar masyarakat yang tidak mampu atau bagaimna setelah itu barulah berlanjut ke persoalan admistrasi dan kelengkapan berkas.

Berdasarkan uraian diatas dan ditinjau dari indicator inplementasi penyaluran bantuan sosial yang baik adalah tepat pada sasarannya maka inplementasi penyaluraan bantuan sosial didesa pakeng sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik melalui pertimbangan beberapa narasumber dan kecocokan data yang ada dilapangan.

⁵¹Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, h. 294

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keefektifitas Penyaluran Bantuan Sosial

Bentuk keefektivitasan penyaluran bantuan sosial dapat dilihat dari beberapa faktor pendukung atau indikator dibawah ini:

1) Efisiensi

Efisiensi menurut William N. Dunn berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang telah dikehendaki⁵². Dengan memperhitungkan seberapa banyak usaha yang dipergunakan oleh sumber daya agar dapat tercapai tujuan tersebut. Dana bantuan sosial tunai bagi masyarakat miskin berasal dari APBD Dinas Sosial yang disalurkan setiap bulannya selama 4 bulan sebesar 300 ribu kepada penerima bantuan sosial sembako yang datanya telah dipadankan dan masuk kedalam kriteria data DTKS, nantinya pendistribusian bantuan tersebut akan diberikan berupa ATM⁵³Bank sehingga setiap bulannya warga tidak perlu mengantri untuk mengambil dana bantuan tersebut karena sudah ditransfer ke rekening penerima.

Berdasarkan teori efisisen dan tabel 2 hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dimana sesuatu dapat dikatakan efisien ketika sesuatu yang dilakukan telah melalui beberapa usaha yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan dari usaha tersebut hal ini sejalan

⁵²Sundari, *Analisis Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Jual Beli Pisang*, Jakarta 2017.

⁵³Ishaq, *efisien dan efektifitas* Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

dengan mengukur apakah implementasi penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng sudah bisa dikatakan efisien dengan mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan temuan hasil wawancara menjelaskan bahwa para aparat desa dalam proses penyaluran bantuan sosial telah melalui berbagai macam tahapan yang sudah bisa dikatakan sebagai upaya para aparat desa dalam mencapai tujuan penyaluran bantuan sosial terimplementasikan dengan baik.

Desa Pakeng adalah desa dengan kebanyakan lokasi berada di pedalaman dan memerlukan usaha yang ekstra untuk mencapai lokasi yang terbilang sangat terpencil sarana dan prasarana disana masih sangat sulit bahkan untuk mencapai tempat itu harus ditempu dengan jalan kaki dengan jarak berkilo-kilo meter namun hal ini harus ditempuh oleh pihak aparat desa untuk memastikan atau untuk melakukan survei langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang valid terkait masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

2) Efektifitas

Kriteria yang pertama dalam evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin di desa pakeng menurut William N. Dunn yaitu efektivitas. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang dicapai dengan tujuan. Program Bantuan terkena *cleansing* data dari DTKS. Sedangkan data *take in* merupakan data

penerima baru BST yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan.⁵⁴

Ditinjau dari teori efektivitas dan dikaitkan dengan tabel hasil wawancara bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif ketika dalam prosesnya sudah tertuang proses yang benar-benar telah terlaksana dengan baik terkait masalah ini proses itu meliputi tahapan penentuan tahapan penyaluran dan melalui pendataan dengan data yang valid. di Desa Pakeng dalam proses penyaluran bantuan sosial sudah dapat dikatakan efisien karna masyarakat yang telah menerima bantuan sosial adalah mereka masyarakat yang benar-benar dapat dikatakan tidak mampu hal ini juga di konfirmasi oleh Ibu Roslina selaku aparat Desa Pakeng beliau sangat yakin untuk menjamin bahwa penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng sudah efektif dan masyarakat yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang memiliki ekonomi menengah kebawah dengan kualifikasi penilaian rumah terbuat dari kayu, tidak memiliki jendela cermin, tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki kendaraan lebih dari satu.

3) Ketepatan Sasaran

Berdasarkan teori tepat sasaran dan tabel hasil wawancara didapatkan hasil bahwa sesuatu dapat dikatakan tepat sasaran ketika data yang di dapat telah sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

⁵⁴ Nindya Cahya Rosadi, 2021. *"Peran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang."*, Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. h.45

⁵⁵Dalam hal ini proses pendataan yang dilakukan aparat Desa Pakeng telah memenuhi SOP penyaluran bantuan sosial, beliau juga menambahkan bahwa mekanisme pendataan bantuan sosial dilakukan oleh salah satu aparat desa yang telah benar mengetahui kondisi lingkungan masyarakat disana terutama dalam persoalan perekonomian ia akan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan kerumah warga yang memang telah di sepakati sebagai salah satu kandidat penerima bantuan sosial apabila data yang didapat sudah cocok dengan yang dilapangan maka orang tersebut akan dimasukkan sebagai kategori orang yang layak menerima bantuan sosial.

Seperti halnya yang telah di jelaskan diatas bahwa di Desa Pakeng para aparat Desa akan benar-benar memastikan apakah yang mendapat bantuan sosial sudah benar-benar termasuk masyarakat yang dengan kategori ekonomi menengah kebawah. Hal ini juga di konfirmasi oleh beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa saya sering melihat aparat Desa mengunjungi beberapa rumah yang ada didusun ini untuk melihat langsung kondisi dilapangan. Berlandaskan agrumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di Desa pakeng sudah efisien dan tepat pada sasarannya.

4) Perataan

⁵⁵ Rumpia, Gifried R dkk, "*Efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Ifrastruktur Perdesaan*" (Studi: Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara", 2019 h.36

Berdasarkan teori perataan dan hasil wawancara dikatakan bahwa kriteria implementasi kebijakan yang baik itu menurut William N. Dunn yaitu berhubungan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. Perataan program penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berkaitan dengan manfaat pendistribusian yang merata kepada masyarakat penerima manfaat. Namun hal ini yang menjadi kekurangan dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng dikarenakan para aparat desa belum mampu untuk melakukan pemerataan penerimaan bantuan sosial yang dikarenakan beberapa hambatan diantaranya, bantuan sosial yang masih sangat kurang sehingga membuat aparat desa kesulitan untuk memberikan secara merata kepada mereka dalam hal ini aparat Desa akan benar-benar melihat siapa yang paling layak dan berhak menerima bantuan sosial.

⁵⁶ Adapun factor penghambatnya meliputi ;

1. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan teori dan hasil wawancara didapatkan bahwa ada beberapa hambatan yang harus dilalui oleh pihak Appart Desa Pakeng diantaranya Hambatan yang pertama adalah persoalan sarana dan prasarana di mana seperti yang lumbrach kita ketahui bahwa masih banyak daerah yang termasuk daerah pelosok yang akses menuju ketempat itu membutuhkan usaha yang sangat sulit

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha Al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 143-144.

kadang ada daerah yang harus ditempuh dengan jalan kaki hal ini yang menjadi kesulitan bagi para aparat menyalurkan bantuan sosialnya.

2. Keterlambatan Dana Masuk Dari Pihak Pusat

Hambatan yang kedua yaitu keterlambatan dana dari pusat yang mengakibatkan proses penyaluran bantuan sosial terhambat. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa hambatan ini merupakan hambatan yang paling berpengaruh dikarenakan apabila dana dari pemerintah pusat belum masuk maka proses penyaluran bantuan tidak dapat diteruskan Sehingga para aparat harus menunggu adanya dana dari pusat baru bisa melakukan proses penyaluran dana-dana bantuan sosial.

3. Ketidaksiapan Pihak Aparat Desa

Kegiatan yang banyak mengakibatkan para aparat desa menjadi kewalahan dalam menjalankan proses penyaluran bantuan sosial sehingga mengakibatkan proses penyaluran bantuan sosial ditunda sementara. Sampai menunggu adanya waktu yang tepat.⁵⁷ Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa Di Desa Pakeng terkadang proses penyaluran bantuan sosial terlambat karna aparat desa tidak dapat menghendel jalannya proses pendistribusian bantuan yang dikarenakan oleh beberapa factor

⁵⁷ Sri Lestari Rahayu, „Bantuan Sosial di Indonesia“, Bandung: Fokus Media (2012)

misalnya agenda tersebut bertepatan dengan kegiatan desa lainnya yang sehingga mengakibatkan jadwal penyaluran bantuan sosial harus diundurkan.

3. Kesesuaian Proses Pendistribusian Bantuan Sosial Dengan Nilai-Nilai Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Kegiatan distribusi telah diatur dalam Islam Aturan distribusi dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi, pemerintah desa pakeng dan masyarakat desa pakeng dalam melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan tuntunan yang benar. Tuntunan tersebut salah satunya tertuang dalam *fiqh al-mu'âmalah*. *Fiqh al-mu'âmalah* menetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal muamalah yang berbentuk kegiatan distribusi adalah boleh. Kegiatan distribusi dikatakan tidak boleh sampai terdapat nash AlQur'an yang mengharamkannya. Jadi, kegiatan distribusi dalam perspektif Islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ada larangan dari nash AlQur'an. Selain itu, *fiqh al-mu'âmalah* juga menetapkan bahwa segala bentuk transaksi dalam kegiatan distribusi dapat dan boleh dilakukan dengan cara apapun berdasarkan kebiasaan yang baik dan benar (*'urf shahih*) yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Adapun nilai-nilai distribusi yang diterapkan dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng yaitu:

a. Keadilan

Nilai Keadilan adalah suatu sifat dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan sendiri berasal dari dasar kata 'adil' yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang

(sepatutnya). Berdasarkan temuan atau hasil penelitian dilapangan diamana pada nilai keadilan Aparat desa pakeng bisa menjamin bahwa dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pakeng ini sudah tepat sararan namun memang belum merata salah satu kendala hal yang menyebabkan ketidak merataan penyaluran bansos di desa pakeng ini karna itu tadi jumlah bantuan yang mau disalurkan⁵⁸

b. Kemaslahatan

Berdasarkan teori kemaslahatan dan hasil wawancara yang kami temukan dilapangan mengenai nilai kemaslahatan adalah Di Desa Pakeng sangat menjunjung tinggi bahwa salnya Dalam kehidupan yang mulia dan sejahterah didunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. masalah adalah segala bentuk keadaan baik materialmaupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia. Masalahah adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam karna asas yang terkait atau terkandung dalam maslaha adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqashid al-syariah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa,akal,keturunan dan harta. Maka dari itu para aparat desa sangat memperhatikan betul siapa yang akan di tuju bantuan tersebut agar sekiranya

⁵⁸Muhalki Ahmad, *Penrapan Nilai-Nilai Distribusi Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Yogyakarta h.45

masyarakat Desa Pakeng dapat hidup dengan sejahtera dalam kemaslahatan.

c. Moral

Moral beranjak dari kata *moralis*. Disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada moralitas berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal memberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi hukum moral tidak tetapi menembus kedalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja. Misalnya dalam kasus seorang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persis dengan nilai moral. Tapi jika niatnya jelek hanya untuk *riya*,⁵⁹

⁵⁹Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 134.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas hal yang ditemukan oleh peneliti sekaligus sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut;

Mekanisme penentuan penerima bantuan sosial memiliki beberapa tahapan diantaranya yaitu mengadakan rapat dengan para aparat desa selaku pejabat desa dengan tujuan atau agenda untuk mendapatkan calon kandidat penerima bantuan sosial rapat tersebut dihadiri oleh para aparat desa, RT RW dan para tokoh agama atau tokoh terkemuka di desa tersebut, kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan kandidat penerima bantuan yaitu para peserta yang hadir akan memberikan nama-nama calon kandidat penerima bantuan.

Setelah itu para peserta rapa akan mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan bersebut. Setelah itu para appart desa akan melakukan survei langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data yang diperoleh di rapat sama dengan data yang ada dilapangan kemudian apabila dirasa sama maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses yaitu kelengkapan berkas dan administrasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mekanisme pemberian bantuan sosial kadang ada hambatan dan factor yang menjadi pendukung suksesnya penyaluran bansos dimana factor pendukungnya adalah tepat sasaran waktu dan jumlah sedangkan faktore penghambat yaitu ada sarana dan prasarana, kesiapan pihak aparat desa dan keterlambatan dana masuk dari pusat.

B. Saran

Saran saya selaku penulis agar sekiranya dalam proses mekanisme bantuan sosial ini benar-benar disalurkan ke benar-benar memnutuhkan tanpa melibatkan hubungan keluarga sebagai alasan utama untuk memberikan bantuan sosial. Masyarakat yang benar-benar dalam kateggori miskin diberikan bantuan sosial agar sekiranya dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Al-karim

Agustinova. Danu, Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.

Sutarbi. Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Triyono. Warnadi, Aris. 2019. *Manajemen Pemasaran* . Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Departemen Pendidikan Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jajuli. Sulaeman. 2018. *Ekonomi Dalam Al-Qur' An* . Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Jepersounhutean. 2018. *Konsep Sistem Informasi* . Yogyakarta: Depublish Publisher.

Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Daniel. Mochar. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* . Jakarta: Bumi Aksara.

Dr. Sri Marmoah, M. Pd. 2018. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Sri. Hartati & Murdin Ismail. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial* . Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Suardi. Didin & Muklis. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam* Surabaya: Cv Jakad Media Publishing.

Subagyo. Dkk. 2018. *Akutansi Manajemen Berbasis Desain*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Salam. Muslim. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif, Menggugat Doktrin Kualitatif* . Makassar: Masagena Press.

Siboro. 2014. Analisis Strategi Saluran Distribusi Minyak Pelumas Enduro Pada Pt Arjuna Lumas Dwiguna Pekanbaru. *Media.Neliti.Com* , 7-8.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Benny Racham. Adang, Agustian, Wahyudi. 2018. Efektifitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rasta) Dan Bantuan Pangan Non-Tuna (Bpnt). *Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian Vol. 16 No.1*
- Arifin. Sirajul, Novie, Andriani, Zakariya. 2020. Distribusi Dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1* , 159-160.
- Zulkarnaen. Wandy, Dkk. 2020. Pengembangan *Supply Chain Management* Dalam Pengelolaan Distribusi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akutansi Vol. 4 No. 2* , 227
- Kartawati. 2017. Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan* .
- Nia Prasetyaningsih, 2019 “potensi Pasar Tradisinoal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Sarjana: *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institus Agama Islam Negeri Purwokerto*.
- Nindya Cahya Rosadi, 2021. “Peran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang.” , Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. h.45
- Peraturan Mentri Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2009, Penyaluran Belanja Bantuan sosial di Lingkungan Kementrian Sosial.
- Richard M, Strees, 1985. Peran Organisasi, Terj Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga.
- Richard M, Strees, Efektivitas Organisasi , (Jakarta: Erlangga, 1985)
- Rizki Rigeras Aldzuhri D, 2021. „Peran Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal“, Skripsi Sarjana: Fakultas Sosial Dan ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
- Rumpia, Gifried R dkk, “Efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Ifrastruktur Perdesaan” (Studi: Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara”, 2019
- Siagin Sondang P. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakrta: PT Rineka Cipta, 2020
- Said Mudasir, 2019. “ Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Kabupaten

- Sumodiningrat Gunawan, Membangunan Perekonomian Rakyat,
(Yogyakarta: IDEA, 1998)
- Sri Lestari Rahayu, „Bantuan Sosial di Indonesia“, Bandung: Fokus Media (2012)
- Soekanto, Soerjono Sosiologi. 2013. Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi.
- Sondang P. Siagin, 2020. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakrta: PT Rineka
Cipta.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:
Alfabeta.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Parepare: IAIN Parepare, (2020)
- Totok madikanti dan poerwoko soebinto, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif
kebijakan publik, (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Torang, Syamsir. 2014 Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya &
Perubahan Organisasi.
- Zhrotul Anna Wahidah, Et al. 2022. Prosedur penyaluran Bantuan Sosial di Era
Pandemi Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Vol 16. No. 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.106/In.39.8/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURSYAM
Tempat/ Tgl. Lahir : LAJORO, 13 APRIL 2001
NIM : 19.2400.002
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : VI (TUJUH)
Alamat : LAJORO, DESA PAKENG, KECAMATAN LEMBANG,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EVALUASI SISTEM DISTRIBUSI ISLAM DALAM MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PAKENG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 10 Januari 2023
Dekan,



Muzdalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0044/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-01-2023 atas nama NURSYAM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0072/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 12-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0044/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 12-01-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NURSYAM
 4. Judul Penelitian : EVALUASI SISTEM DISTRIBUSI ISLAM DALAM MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PAKENG KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KANTOR DESA DAN MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



ZONA





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECEMATAN
LEMBANG DESA PAKENG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala desa pakeng menerangkan bahwa :

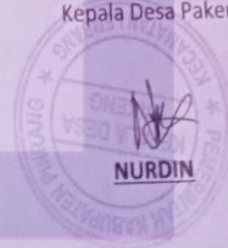
Nama : NURSYAM
Nim : 19.2400.002
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/prog.study : Mahasiswa/ Ekonomi Syariah,Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Lajoro,Desa Pakeng,Kec. Lembang,Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Pakeng,Kec. Lembang,Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI NILAI DISTRIBUSI ISLAM DALAM MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PAKENG KABUPATEN PINRANG**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lajoro, 22 Februari 2023

Kepala Desa Pakeng



PAREPARE

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : NURSYAM
 NIM : 19.2400.002
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : EVALUASI SISTEM DISTRIBUSI ISLAM
 DALAM MEKANISME PEMBERIAN
 BANTUAN SOSIAL DIDESA PAKENG
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

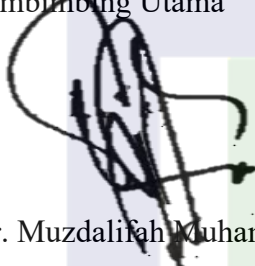
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan social didesa pakeng ini?
2. Menurut bapak apakah penyaluran bantuan sosial ini sudah tepat sasaran?
3. Siapa yang melakukan pendataan penerima bantuan social?
4. Menurut bapak apakah ada masyarakat yang ekonominya menengah keatas namun mendapatkan bantuan sosial?
5. Menurut bapak apakah ada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah namun tidak mendapat bantuan sosial?
6. Bagaimana menurut bapak apakah proses penyaluran bantuan sosial ini sudah termasuk adil dan sudah menjamin kesejahteraan rakyat yang kurang mampu?
7. Menurut bapak apa yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial ini ?

Parepare, 06 Januari 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

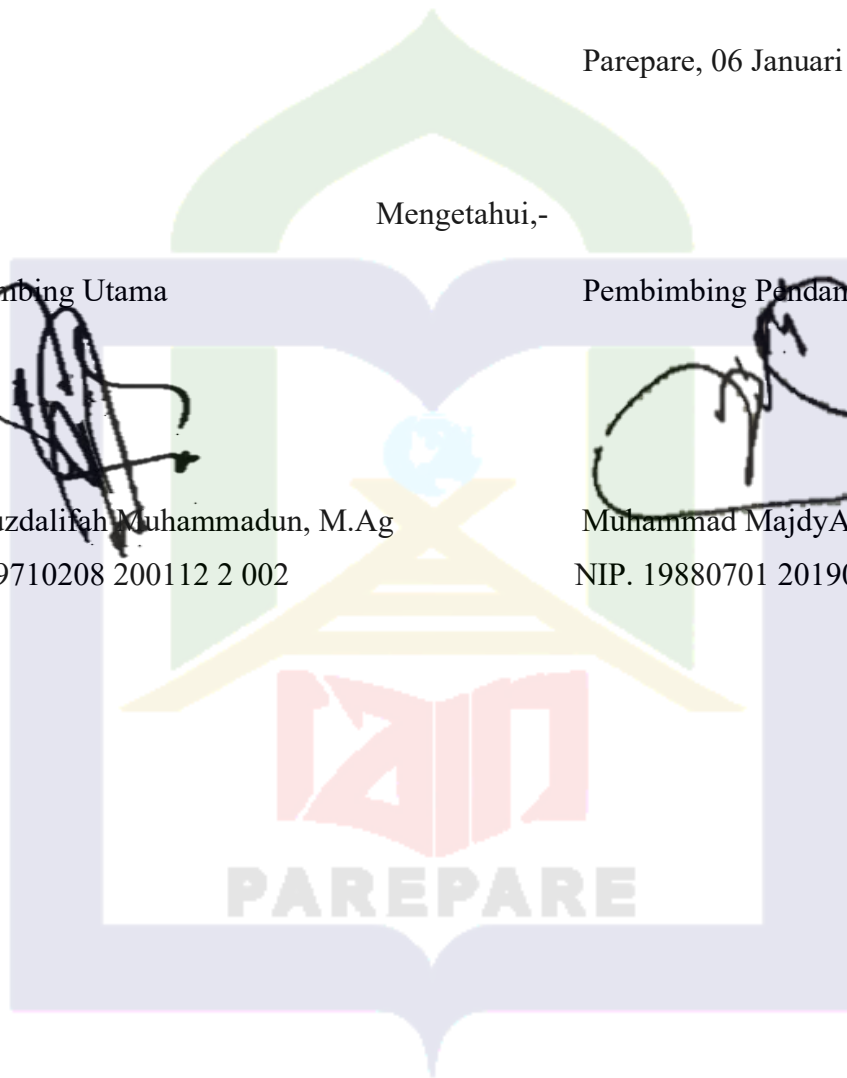
NIP. 19710208 200112 2 002

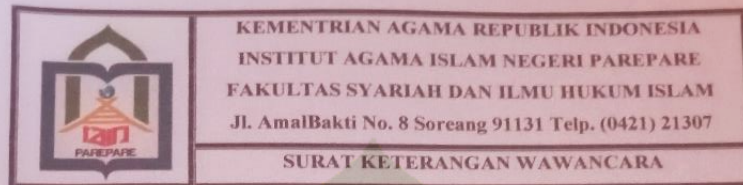
Pembimbing Pendamping



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.

NIP. 19880701 201903 1 007





Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasni
Alamat : Lajoro
Pekerjaan : IRT

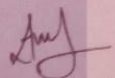
Menerangkan bahwa

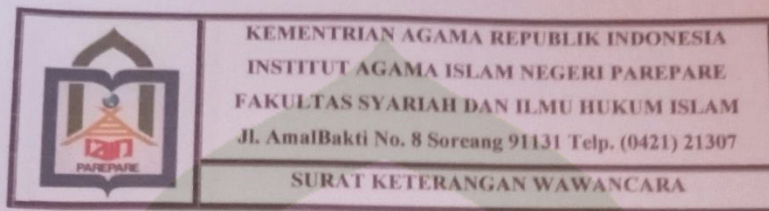
Nama : Nursyam
Nim : 19.2400.002
Program studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pakeng Januari 2023

()



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana
Alamat : Lajoro
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa

Nama : Nursyam
Nim : 19.2400.002
Program studi : Ekonomi Syariah

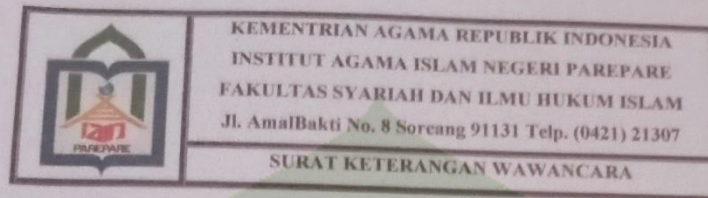
Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Desa Pakeng Januari 2023

()



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina
Alamat : Layoto
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

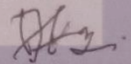
Nama : Nursyam
Nim : 19.2400.002
Program studi : Ekonomi Syariah

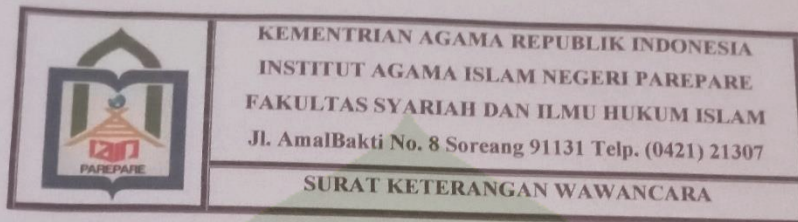
Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pakeng Januari 2023

PAREPARE

()



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pak Edi
 Alamat : Tuppu
 Pekerjaan : Pendamping Desa

Menerangkan bahwa

Nama : Nursyam
 Nim : 19.2400.002
 Program studi : Ekonomi Syariah

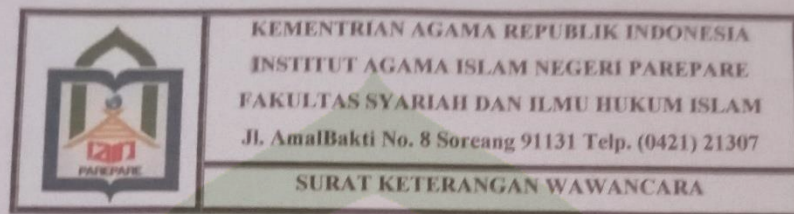
Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Desa Pakeng 18 Januari 2023

(.....)



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tanna
Alamat : Jayore
Pekerjaan : NKT

Menerangkan bahwa

Nama : Nursyam
Nim : 19.2400.002
Program studi : Ekonomi Syariah

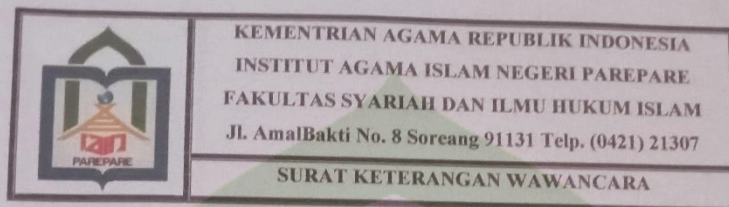
Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Desa Pakeng 04 Januari 2023





Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosna
Alamat : Lajoro
Pekerjaan : Perangin Desa

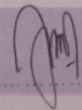
Menerangkan bahwa

Nama : Nursyam
Nim : 19.2400.002
Program studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pakeng 18 Januari 2023



(.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307	
SURAT KETERANGAN WAWANCARA	

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAMA
 Alamat : Lajoro
 Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Nursyam
 Nim : 19.2400.002
 Program studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan sosial Di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pakeng Januari 2023

PAREPARE

(Signature)
 (.....)

DOKUMENTASI PENELITIAN



PAREPARE



 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LEMBANG DESA PAKENG**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala desa pakeng menerangkan bahwa :

Nama : NURSYAM
Nim : 19.2400.002
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/prog.study : Mahasiswa/ Ekonomi Syariah,Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Lajoro,Desa Pakeng,Kec. Lembang,Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Pakeng,Kec. Lembang,Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI NILAI DISTRIBUSI ISLAM DALAM MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PAKENG KABUPATEN PINRANG"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lajoro, 22 Februari 2023
Kepala Desa Pakeng


NURDIN





BIODATA PENULIS

NURSYAM, Lahir di Lajoro, Sulawesi selatan. Pada tanggal 13 April 2001 merupakan anak kedua dari Bapak Tahir dan Ibu Irma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Sekolah Dasar di SDN 149 Sepang, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Lembang, Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Ekonomi Syariah.

Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis pernah mengikuti lomba SBP Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “Implementasi Nilai Distribusi Islam dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial di Desa Pakeng Kabupaten Pinrang”.